

KINERJA KEUANGAN DAERAH PASCAOTONOMI DAERAH STUDI PADA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2008-2012

RevoAndika, Vekie Rimate dan Audie Niode

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan,
Universitas Sam Ratulangi, Manado
Email : revoandika01@gmail.com*

ABSTRAK

Analisis terhadap kinerja keuangan daerah di daerah Kota Kotamobagu merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan di daerah Kota Kotamobagu dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah rasio derajat desentralisasi dan rasio belanja daerah terhadap PDRB. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kota Kotamobagu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun, diinterpretasikan, dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap atau gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu. Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Kotamobagu masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk kelima rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata kunci: Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB.

1. PENDAHULUAN

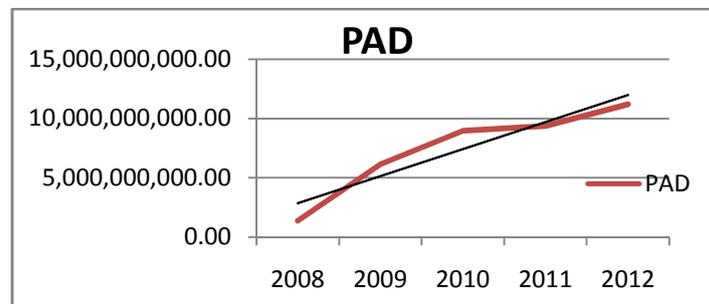
Dorongan adanya pemberlakuan sistem desentralisasi di Indonesia pada dasarnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting yakni antara lain adanya kemunduran pembangunan ekonomi saat mulai beroperasinya globalisasi dunia, meningkatkan tuntutan perubahan tingkat pelayanan publik serta semakin kentara adanya indikasi dis-integrasi akibat gagasan sistem sentralisasi yang diberlakukan dalam pemberian pelayanan publik. Untuk menerapkan desentralisasi aspek yang sangat perlu dipertimbangkan adalah menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dalam pembangunan sosial maupun pembangunan ekonomi. Adapun diberlakukan program otonomi daerah agar menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan cultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang sangat penting adalah terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Manfaat kinerja merupakan proses untuk mengukur suatu kesesuaian realisasi dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi pada umumnya diturunkan dari perencanaan strategis, yaitu dimulai dari visi dan misi dan kebijakan yang dibuat. Selanjutnya perumusan tujuan, sasaran, penyusunan program dan anggaran serta penetapan tugas dan fungsi harus mengacu pada perencanaan strategis yang sudah ditetapkan. Kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi mendapatkan atau sumber ekonomi, mengetahui kondisi keuangan daerah, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan Mahmudi (2010:142). Analisis rasio keuangan terdiri dari rasio pertumbuhan analisis pendapatan, rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi dan rasio belanja daerah terhadap PDRB.

Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu. Adapun maksud dari pembentukan kota Kotamobagu diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Luas wilayah Kota Kotamobagu sebesar 68,06 Km² terdiri dari empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kotamobagu Utara, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kecamatan Kotamobagu Selatan dan Kecamatan Kotamobagu Barat. Adapun permasalahan yang dihadapi daerah Kota Kotamobagu saat ini adalah mengenai pembiayaan daerah, berikut adalah gambaran umum Pendapat Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan APBD Kota- Kotamobagu dalam Tabel.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota kotamobagu era Otonomi Daerah Tahun 2008-2012

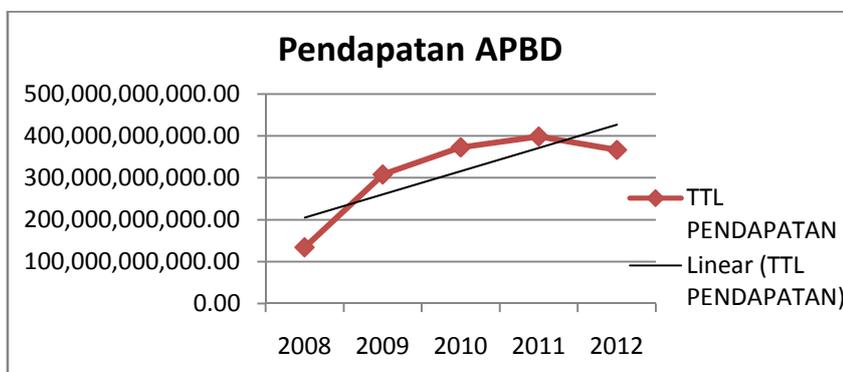
No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
1	2	3	4	5=3/4
1	2008	1.370.864.926,00	134.589.898.082,00	1,02%
2	2009	6.142.246.220,00	308.388.576.553,00	1,99%
3	2010	8.957.373.862,00	373.073.381.501,00	2,40%
4	2011	9.355.251.155,00	398.888.262.348,00	2,35%
5	2012	11.188.179.886,00	366.979.721.703,00	3,05%



Sumber : data diolah , BPS Kota Kotamobagu

Grafik 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu 2008 - 2012

Dari data diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2008 sampai 2012. Dari data Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut menunjukkan pada tahun 2008 merupakan Pendapatan Asli Daerah yang rendah hanya sebesar Rp 1.370.864.926,00. Tahun 2009 terjadi kenaikan sebesar Rp. 6.142.246.220,00 tahun 2010 terjadi juga kenaikan sebesar Rp. 8.957.373.862,00. Kemudian ditahun 2011 meningkat sebesar Rp. 9.355.251.155,00. dan tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar Rp. 11.188.179.886,00. Meskipun begitu tren Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tren positif.



Sumber : BPS Kota Kotamobagu data diolah Grafik 1.2

Begitu pula dengan Pendapatan APBD Kota-Kotamobagu, dapat dilihat dari grafik 1.2 diatas, tahun 2008 sampai tahun 2009 mengalami peningkatan sampai tahun berikutnya di tahun 2011. Akan tetapi ditahun 2012 dapat dilihat mengalami penurunan, meskipun begitu tren Pendapatan APBD masih bersifat Positif.

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend kenaikan peran atau kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2012 diperkirakan akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuklandasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Kotamobagu selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada.

Proporsi pendapatan terbesar memang masih berasal dari pos dana perimbangan. Proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD. Hal ini membuktikan peran pemerintah pusat sangat penting bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dari Tahun 2008-2012

Tahun	Belanja Pemerintah
2008	118.321.979.873
2009	286.498.394.297
2010	327.246.937.526
2011	380.609.130.183
2012	367.995.480.953

Berdasarkan pada latar belakang masalah maka bisa ditarik kesimpulan yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu selama lima tahun terakhir (2008-2012).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu selama lima tahun terakhir (2008- 2012).

Definisi Otonomi Daerah

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

”Menurut Halim (2001 :19), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah ;

- 1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah,
- 2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan keuangan pusat dan daerah.

Definisi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 (sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005), tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan terhadap keuangan daerah setelah dikeluarkannya undang –undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Beberapa peraturan pelaksanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Halim (2007 : 2) antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
5. Surat Mnetri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Tanggal 17 November 2000 Nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, PertanggungJawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Cara Keuangan Daerah, serta Penyusunan Perhitungan APBD.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja (Performance) dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Menurut Halim (2004 : 24)

kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Adapun maksud tentang Kinerja Keuangan Dalam Pemerintahan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan APBD yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran dengan membandingkan anggaran sebelum/sesudahnya. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa Rasio Keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Prinsip ini yang mendasari pendapatan asli daerah adalah melalui desentralisasi fiskal dimana didalamnya terdapat fungsi dan kewenangan daerah yang harus dijalankan. Pemerintah daerah (Pemda) pada prinsipnya harus memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritasnya, serta didukung oleh penerimaan daerah yang memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah tidak hanya berasal dari daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga termasuk bagi hasil (*Revenueshaing*) dan transfer yang berasal dari pusat. Sesuai dengan asas desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup.

Sumber pendapatan daerah sendiri yang diatur dalam UU NO.28 Tahun 2009 terdiri dari:

- (1) Hasil dari pajak Daerah,
- (2) Hasil dari Retribusi daerah,
- (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan,
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana bersifat memaksa. Menurut UU No.32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Prakosa,2004). Retribusi Daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan.

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintah daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelolah kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik daerah (BUMD). BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

Teori Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah

Penerapan otonomi daerah oleh pemerintah pusat di Indonesia memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam mengelolah rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan untuk pembangunan dan menjadi komponen penerimaan daerah dalam APBD. Menurut Sidik (2000), transfer pemerintah pusat diharapkan menjadi faktor pendorong bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pengumpulan penerimaan daerahnya. Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik digunakan untuk pembangunan, daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dengan mengupayakan peningkatan pelayanan publiknya. Belanja daerah yang dilakukan pemerintah perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas diberbagai sektor. Produktivitas masyarakat diharapkan semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Teori Peranan Pemerintah dalam Perekonomian

Dalam lingkup regional, pemerintah mempunyai peranan dan fungsi yang strategis dalam mempengaruhi perekonomian. Dalam pandangan Klasik Adam Smith, pemerintah mempunyai tiga fungsi, yaitu: fungsi pemerintah memelihara ketahanan dan keamanan, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan serta fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang umum (Suparmoko, 1999). Menurut Musgrave (Kuncoro, 2007), dalam pandangan teori ekonomi publik, kebijakan pemerintah berperan dalam mempengaruhi perekonomian

melalui anggaran berfungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi. Menurut Sutriyono (2006), fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut;

- a. Fungsi alokasi, yaitu pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber perekonomian kepada seluruh masyarakat secara efisien.
- b. Fungsi distribusi, yaitu pemerintah berperan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat secara proporsional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi masyarakat yang optimal.
- c. Fungsi stabilisasi, yaitu pemerintah berperan dalam menjaga dan menjamin perekonomian secara makro.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini dinyatakan dalam pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pembangunan tersebut digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi untuk mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan perkapita. Pengeluaran pembangunan juga merupakan salah satu *input* produksi yang dapat menghasilkan *output*. Pengeluaran rutin mempunyai peranan dan fungsi cukup besar dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sekalipun pengeluaran tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan pembentukan modal untuk tujuan peningkatan produksi, melainkan menunjang kegiatan pemerintahan serta peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan. Secara agregat, peningkatan pengeluaran pemerintah akan ikut menambah pendapatan nasional sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan milik pmda dan pendapatan daerah lainnya. Pendapatan asli daerah yang terbesar dikumpulkan melalui penerimaan berbagai pajak dan retribusi daerah. Di mana pajak dan retribusi akan mengurangi kemampuan daya beli masyarakat yang mengakibatkan menurunnya pendapatan nasional yang berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi.

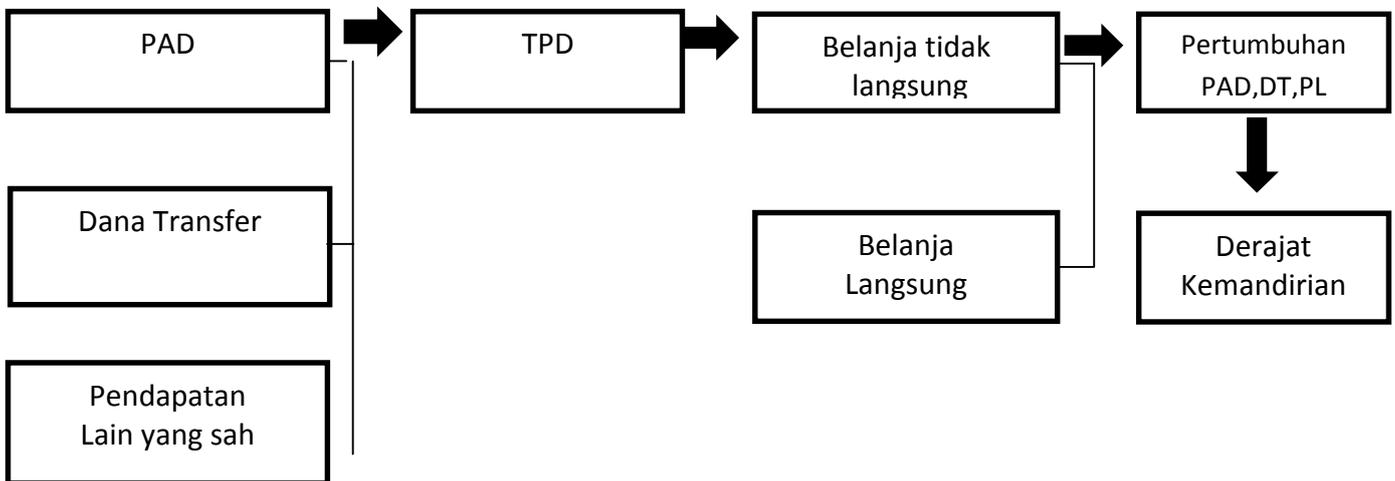
Namun, jika pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan asli daerah tersebut untuk dapat sepenuhnya digunakan sebagai penggerak roda perekonomian maka akan dapat meningkatkan pendapatan nasional yang pada akhirnya akan berdampak peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Dalam penelitian ini, istilah yang penulis maksudkan tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Dapat dilihat pula semakin tinggi kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin

mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat, apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

Kerangka Pemikiran Teoritis



2. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada dan tersedia baik di buku-buku literatur ataupun sumber-sumber lain. Data sekunder ini terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Keterangan Pertanggung jawaban serta data pendukung lainnya yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Model Analisis

Analisis Pertumbuhan Pendapatan :

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif.

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan}_t = \frac{\text{Pendapatan}_t - \text{Pendapatan}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah :

Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah :

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Transfer} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Rasio Derajat Desentralisasi :

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB

Rasio ini merupakan perbandingan antara total belanja daerah dengan produk domestik regional bruto (PDRB) yang dihasilkan daerah. Rasio ini menunjukkan produktivitas belanja daerah. Semakin rendah rasio ini maka belanja daerah semakin produktif dan efektif.

$$\text{Rasio Belanja Daerah} = \frac{\text{Total Belanja Daerah} \times 100\%}{\text{Total PDRB}}$$

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

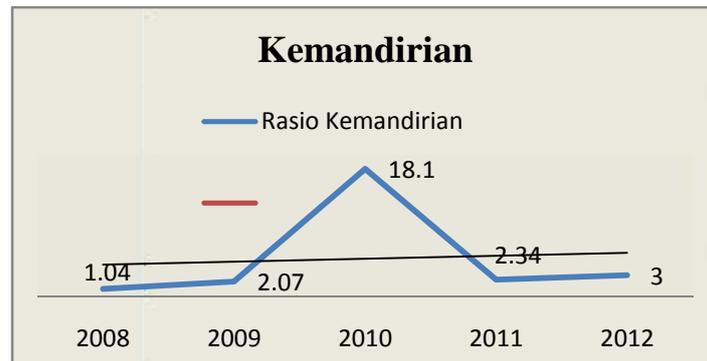
Grafik Analisis Pertumbuhan Pendapatan Kota Kotamobagu Tahun 2008-2012



Sumber : BPS Kota Kotamobagu, data diolah Grafik 4.1

Pada grafik pertumbuhan analisis pendapatan daerah Kota Kotamobagu terjadi penurunan yang tajam. Pada tahun 2008 terjadi pertumbuhan sebesar 860%, dan berlanjut ditahun berikutnya ditahun 2009 pertumbuhan pendapatan menurun sebesar 143% kemudian ditahun 2010 turun sebesar 20,8% dan ditahun 2011 sebesar 6,91% kemudian ditahun terakhir dalam data, di tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup jauh sebesar -8,02%. Jadi secara keseluruhan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dalam data menunjukkan penurunan yang sangat tajam. Maka dari itu dalam grafik rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan trend bersifat negatif.

Grafik Kemandirian Keuangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008-2012

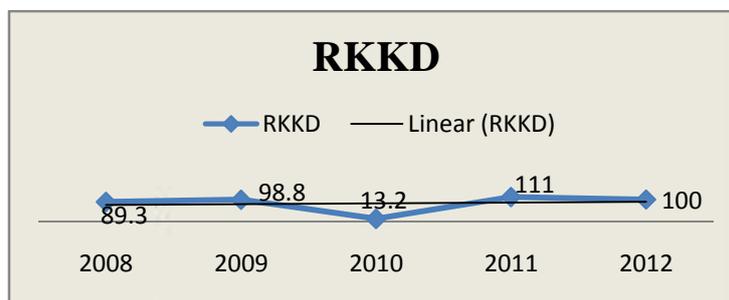


Sumber :BPS Kota Kotamobagu data diolah Grafik 4.2

Terlihat pada grafik bahwa secara keseluruhan rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan Daerah Kota Kotamobagu akan bantuan dari pihak luar masih sangat tinggi, bahkan dari penulis lakukan didapati pada tahun awal penelitian di tahun 2008 sebesar 1,04%, dan kemudian hanya mengalami kenaikan sedikit ditahun 2009 sebesar 2,07% dan pada tahun 2010 melonjak naik sebesar 18,1% kemudian ditahun 2011 penurunan terjadi sangat jauh sebesar 2,34% kemudian ditahun berikutnya ditahun 2012 hanya mengalami kenaikan sebesar 3,00% . Oleh dari itu dalam grafik rasio kemandirian trend menunjukkan kurang baik.

Performa keuangan daerah Kota-Kotamobagu ditinjau dari rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kota-Kotamobagu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dilihat dari data yang ada menunjukkan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan data menunjukkan mengalami naik turun atau berfluktuasi.

Rasio Ketrgantungan Keuangan daerah



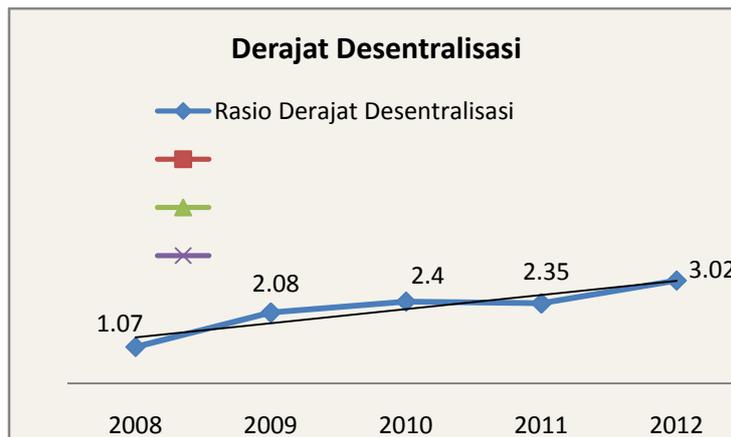
Sumber :BPS Kota Kotamobagu data diolah Grafik 4.3

Grafik diatas menunjukkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu. Secara keseluruhan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan ditahun awal Rasio ketergantungan ditahun 2008 sebesar 89,3%,ditahun 2009 sebesar 98,8% dan pada tahun 2010

mengalami penurunan, hanya sebesar 13,2% dan meningkat kembali di tahun 2011 sebesar 111% berlanjut ditahun 2012 rasio ketergantungan sebesar 100%.

Dari angka-angka tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, dari aspek rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, daerah Kota Kotamobagu masih sangat tergantung dari dana transfer Pemerintah Pusat. Maka trend menunjukkan Rasio ketergantungan keuangan daerah bersifat negatif.

Rasio Derajat Desentralisasi

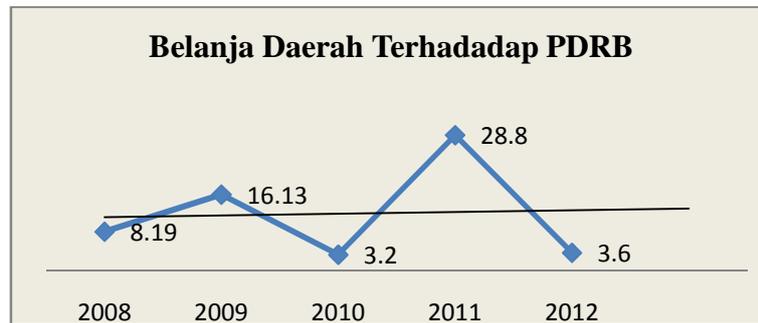


Sumber :BPS Kota Kotamobagu data diolah Grafik 4.4

Rasio Derajat Desentralisasi daerah Kota Kotamobagu nampaknya selang periode tahun 2008- 2012 menunjukkan angka yang kurang baik. Hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2008 tahun awal pemekaran daerah hanya sebesar 1,07 % dan hanya meningkat sedikit dengan angka yang kecil ditahun 2009 sebesar 2,08% sampai ditahun berikutnya 2010 sebesar 2,40% dan berlanjut ditahun 2011 sebesar 2,35% dan tahun 2012 sebesar 3,02%.

Namun grafik diatas menunjukkan rasio derajat desentralisasi masih memiliki tren Positif. Performa tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah dilihat dari peningkatan Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam melaksanakan desentralisasi masih kurang baik.

Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB



Sumber :BPS Kota Kotamobagu data diolah

Grafik 4.5 Belanja Daerah Terhadap PDRB

Rasio Belanja Daerah Terhadap PDRB, daerah Kota Kotamobagu dapat dilihat pada grafik diatas menunjukkan bahwa dari tahun ketahun 2008-2012 mengalami pembesaran dengan angka yang cukup besar diawali di tahun awal di tahun 2008, sebesar 8,19 dan tahun selanjutnya ditahun 2009 sebesar 16,13 tahun 2010 sebesar 3,2 tahun 2011 sebesar 28,8 dan selanjutnya pada akhir tahun sebesar 3,6. Maka dapat disimpulkan rasio belanja daerah terhadap PDRB dikota kotamobagu dari tahun 2008-2012 sangat tidak produktif dan efisien.

4. KESIMPULAN

Performa keuangan daerah Kota Kotamobagu secara keseluruhan selang periode tahun anggaran 2008-2012 mengalami perkembangan yang kurang baik. Hal ini ditunjukkan melalui perhitungan rasio-rasio sebagai berikut :

1. Dapat dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan tahun 2008 pertumbuhan pendapatan daerah kotamobagu sebesar 860% sampai ditahun 2012 pertumbuhan pendapatan hanya sebesar -8,02. Maka bisa disimpulkan dari grafik pertumbuhan pendapatan, daerah Kota kotamobagu dalam rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan tren yang negaif.
2. Kemandirian keuangan daerah Kota kotamobagu dari tahun 2008 sampai tahun 2012 hanya sebesar 3%. Maka bisa dilihat pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu dalam membiayai sendiri kegiatan dalam pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat masih kurang baik dari tahun ke tahun.
3. Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu masih sangat besar bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat.

4. Derajat desentralisasi Daerah Kota Kotamobagu selang periode tahun 2008-2012 menunjukkan trend yang kurang baik. Kemampuan daerah dalam mengelolah keuangan daerah dilihat dari peningkatan Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kurang, karena hanya mencapai diatas 1%.
5. Belanja Daerah Terhadap PDRB daerah Kota Kotamobagu mengalami pembesaran, bisa dilihat dari awal tahun ahun 2008 belanja daerah terhadap PDRB menunjukkan angak sebesar 8,19 sampai di tahun 2012 sebesar 3,6. Maka dapat disimpulkan rasio belanja daerah terhadap PDRB dikota kotamobagu dari tahun 2008-2012 tidak produktif dan efisien.

Mengingat PAD sangat berpengaruh dan perperan penting terhadap roda perekonomian daerah, daerah Kota kotamobagu harus lebih teliti lagi dalam mengelolah keuangan daerahnya sendiri. Dalam peneyelenggaraan otonomi daerah, berarti diberi wewenang yang beser untuk daerah itu sendiri untuk bisa mengelolah keuangannya sendiri. Maka dari itu, daerah Kota Kotamobagu dalam mengelolah keuangan daerah harus lebih baik lagi ditahun yang akan datang dan dapat mengembangkan potensi yang ada didaerah menjadi keunggulan daerah atau sebagai sektor basis daerah. Begitu pun juga ketergantunganya kepada transfer pemerintahan pusat akan menjadi hal yang buruk karena kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajhar, Mhd. Karya Satya, 2008. *“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah”*, Tesis, Departemen Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Anderson, 2003. *Kebijakan Publik sebagai Kebijakan yang Dibangun oleh Badan dan Pejabat Pemerintahan*.
- Arndt. Structural Characteristic of the economy of mozambique: Sam Based Analisis download from [Http://www.econ.ku.dk/pepers/article.pdf](http://www.econ.ku.dk/pepers/article.pdf)
- Badan Pusat Statistik, Kota kotamobagu dalam angka 2013*
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2013. *Realisasi APBD Kotamobagu 2008 – 2012*.

- Bastian, Indra, 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*, BPFE ,Yogyakarta.
2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga, Yogyakarta.
2006. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2001. *Anggaran daerah dan “Fiscal stress” (sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di indonesia) Jurnal Ekonomi dan Bisnis di Indonesia. Volume 16 Nomor 4*
- Halim, Abdul,2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Musgrave R.A and musgrave P.B, 1993, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi kelima, Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi, 2010 *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.Yogyakarta.
- Mardiasmo.2002.*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Prakoso, Kesit Bambang, 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah*, Studi empirik diwilayah provinsi jawa tengah dan Diy,Jaal Vol 08 no 2.
- Robert D.Lee dan Ronald W. Jhonson. *Public Budgeting system*, 6 th editional, and aspen publication, 1998.
- Sukirno,1999. *Pengantar Teori Mikroekonomi*, edisi ketiga, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko, 2011, *keuangan Negara edisi ke enam*, BPFE Yogyakarta.
- Sukirno D. 2008. *Analisis Pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diprovinsi jawa tengah*. Tesis, tidak dipublikasikan FE UNDIP,Semarang.